

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BATU DALAM MENANGGULANGI
KEMISKINAN**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dengan Peminatan Metode Ilmu Politik

Oleh:

Reza Pratama

NIM. 105120501111010



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2016**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BATU DALAM MENANGGULANGI
KEMISKINAN**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dengan Peminatan Metode Ilmu Politik

Oleh:

Reza Pratama

NIM. 105120501111010



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2016**

PERNYATAAN

Nama: Reza Pratama

NIM: 105120501111010

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul **KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BATU DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar dari gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, 2 Juni 2016

Yang membuat pernyataan



Reza Pratama

NIM. 105120501111010

LEMBAR PENGESAHAN

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BATU DALAM MENANGGULANGI
KEMISKINAN**

SKRIPSI

Disusun Oleh :

Reza Pratama

NIM. 105120501111010

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing :

Pembimbing Utama



Dr. Hilmy Mochtar, M.S.

NIP. 19520101 198203 1 006

Tanggal :

Pembimbing Pendamping



Taufik Akbar, S.IP., M.IP.

NIP. 20140585110411001

Tanggal :

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BATU DALAM MENANGGULANGI
KEMISKINAN

SKRIPSI

Disusun Oleh :

Reza Pratama

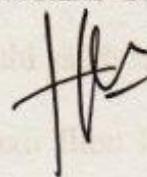
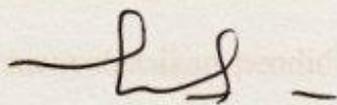
NIM. 105120501111010

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian Sarjana
pada tanggal 02 Juni 2016

Tim Penguji :

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang



Dr. Hilmy Mochtar, M.S.

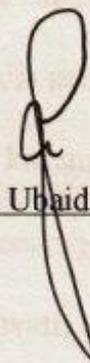
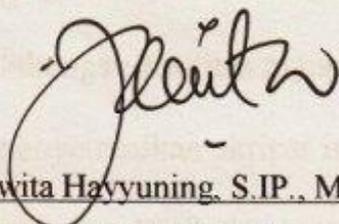
Taufik Akbar, S.IP., M.IP.

NIP. 19520101 198203 1 006

NIP. 20140585110411001

Anggota Penguji

Anggota Penguji



Juwita Hayyuning, S.IP., M.IP.

Ahmad Hasan Ubaid., S.IP., M.IP.

NIP. 89083011120398

NIP.

Malang, 02 Juni 2016

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Brawijaya



Prof. Dr. Unti Ludigdo, Ak.

NIP. 196814 199402 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BATU DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN”** dengan baik.

Penelitian skripsi ini mendasarkan pada analisa terhadap kebijakan Pemerintah Kota Batu dalam menanggulangi kemiskinan. Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang disusun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) di Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang.

Skripsi ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dari berbagai pihak yang berupa bimbingan, pengarahan, petunjuk, serta dukungan baik berupa dukungan fasilitas maupun dukungan moril kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, penulis sangat berterima kasih dan memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Ir. Djoko M Mardjoeki dan Ibu Ratnawati, S.H., selaku kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan bimbingan serta dukungan yang tiada henti kepada penulis.
2. Bapak Dr. Hilmy Mochtar, M.S., dan Bapak Taufik Akbar, S.IP., M.IP., selaku dosen pembimbing penulis, serta Ibu Juwita Hayunning, S.IP., M.IP., dan Bapak Ahmad Hasan Ubaid, S.IP., M.IP., selaku dosen penguji.
3. Bapak Prof. Dr. Unti Ludigdo, Ak., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya serta Bapak Dr. Hilmy Mochtar, M.S.,

selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik atas kesediaannya memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Program Studi Ilmu Politik, FISIP UB.

4. Para informan yang telah memberikan bantuan data dan informasi yang dibutuhkan oleh penulis selama pelaksanaan penelitian lapangan.
5. Paramitha Nurmalina Yudianto yang mana telah memberikan semangat, motivasi, dan dukungan selama ini.
6. Caesar Demas Edwinarta, Alvian Dwiguntara Putra, Joko Wandiro dan seluruh kawan-kawan seperjuangan.
7. Seluruh pihak yang terlibat dalam terselesaikannya skripsi ini, penulis mohon maaf apabila tidak dapat menyebutkan satu per satu.

Penulis berharap semoga laporan hasil penelitian skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca, civitas akademika FISIP UB dan segenap pihak yang terlibat serta berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan sosial, khususnya ilmu politik yang berorientasi pada permasalahan pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan.

Malang, 02 Juni 2016

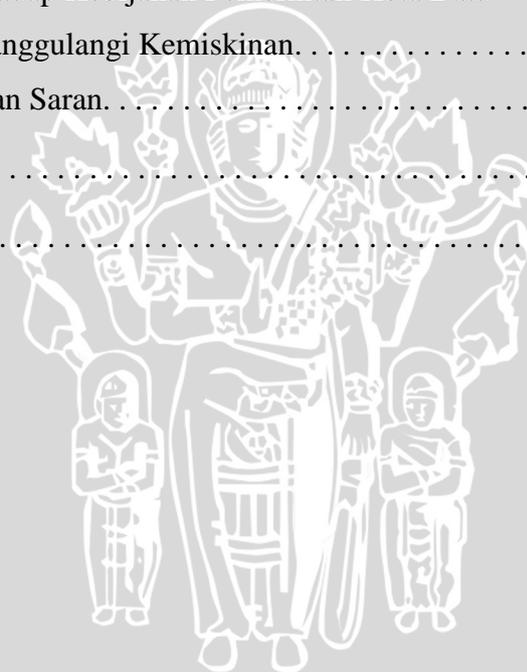
Reza Pratama

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.	i
Halaman Judul.	ii
Lembar Pernyataan Orisinalitas.	iii
Lembar Pengesahan	iv
Lembar Pengesahan Penguji Skripsi.	v
Kata Pengantar.	vi
Daftar Isi.	viii
Daftar Tabel.	x
Daftar Gambar.	xi
Abstrak.	xii
Abstract.	xiii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.	1
1.2 Rumusan Masalah.	8
1.3 Tujuan Penelitian.	8
1.4 Manfaat Penelitian.	8
BAB II Tinjauan Pustaka.	10
2.1 Tinjauan Teoritis.	10
2.1.1 Teori Kebijakan.	10
2.2 Kerangka Konseptual.	13
2.2.1 Kebijakan Publik.	13
2.2.2 Peran.	17
2.2.3 Pemerintah Daerah.	18
2.2.4 Kemiskinan.	19
2.3 Kerangka Pemikiran.	24
2.4 Penelitian Terdahulu.	28
BAB III Metode Penelitian.	31
3.1 Jenis Penelitian.	31
3.2 Penetapan Lokasi Penelitian.	33

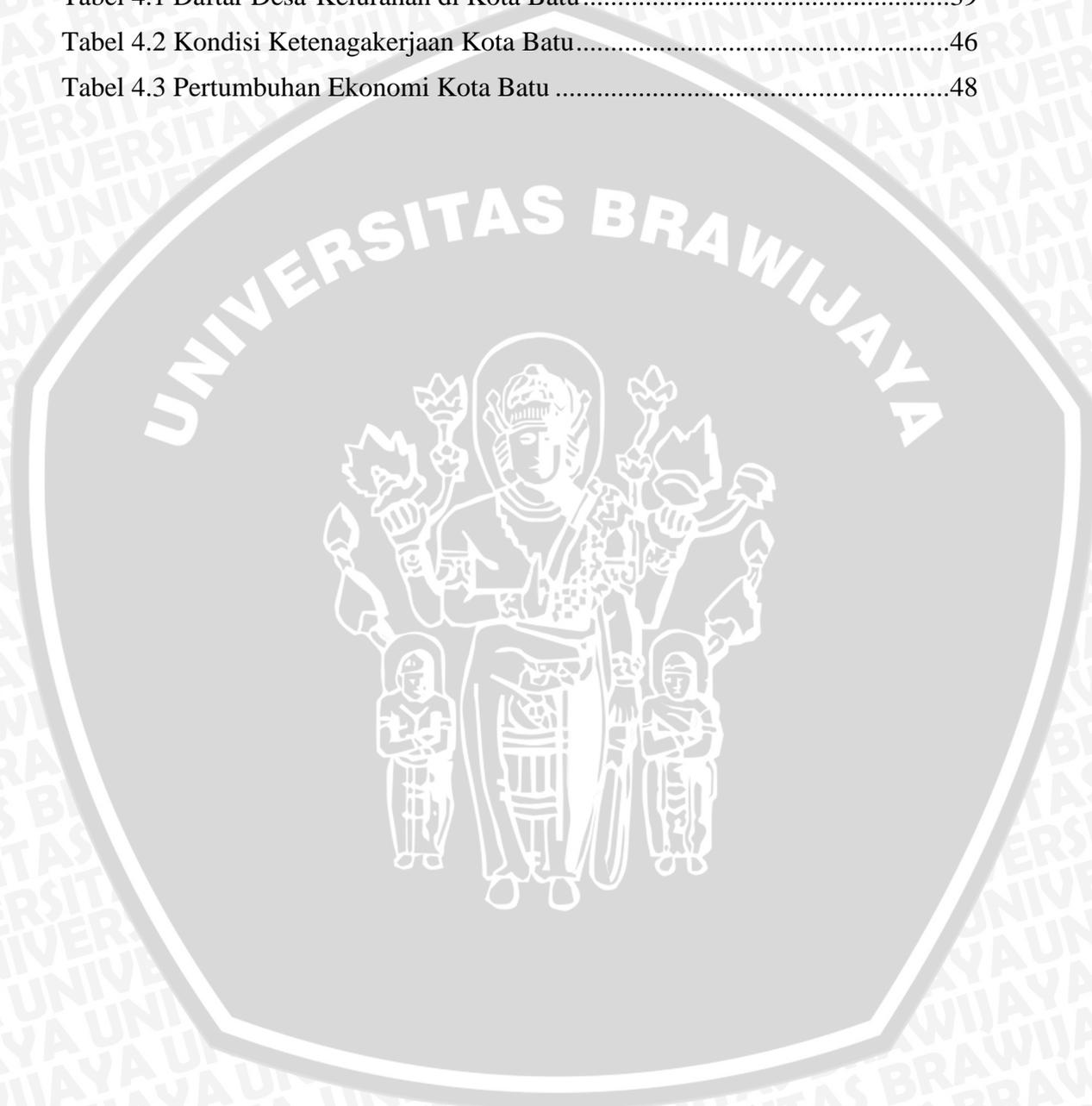


3.3 Fokus Penelitian.	33
3.4 Pemilihan Informan.	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data.	34
3.6 Teknik Analisa Data.	34
3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.	36
BAB IV Gambaran Umum.	37
4.1 Profil Kota Batu.	37
4.1 Kemiskinan dan Perekonomian Kota Batu.	42
BAB V PEMBAHASAN.	49
5.1 Kebijakan Pemerintah Kota Batu dalam Menanggulangi Kemiskinan.	49
5.2 Kajian Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Batu dalam Menanggulangi Kemiskinan.	56
BAB V Kesimpulan dan Saran.	60
Daftar Pustaka.	62
Lampiran-Lampiran.	64



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat Prosentase Kemiskinan Kabupaten-Kota di Jawa Timur	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 4.1 Daftar Desa-Kelurahan di Kota Batu	39
Tabel 4.2 Kondisi Ketenagakerjaan Kota Batu	46
Tabel 4.3 Pertumbuhan Ekonomi Kota Batu	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	27
Gambar 4.1 Peta Kota Batu.....	38



ABSTRAK

Reza Pratama, Program Sarjana, Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang, 2016. Kebijakan Pemerintah Kota Batu dalam Menanggulangi Kemiskinan. Tim Pembimbing: Dr. Hilmy Mochtar, MS., dan Taufik Akbar, S.IP., M.IP.

Penelitian ini berupaya untuk menganalisa kebijakan Pemerintah Kota Batu dalam menanggulangi kemiskinan. Sebagaimana dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Jawa Timur dalam angka tahun 2013, Pemerintah Kota Batu telah berhasil menjadi Kota dengan angka kemiskinan terendah di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini dikaji menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pemilihan informan secara *purposive* yang disertai oleh triangulasi sumber sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data.

Kemiskinan yang ada di Kota Batu bisa ditekan dengan berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan yang dicanangkan Pemerintah Kota Batu, yang mana hal tersebut dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan disini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan dan dapat dinikmati sebanyak banyaknya masyarakat terutama masyarakat miskin. Arah kebijakan ini dilaksanakan dengan meningkatkan dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi dalam sektor-sektor potensial yang memiliki dampak terhadap penurunan kemiskinan secara signifikan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kota Batu dalam mengentaskan kemiskinan adalah membuat program-program yang diharapkan bisa mengurai permasalahan kemiskinan yang ada. Program tersebut diantaranya, Padat karya produktif, ketrampilan bagi generasi muda, perluasan tenaga kerja, usaha mandiri sektor informal (UMSI), peningkatan kemitraan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), bedah rumah, pelayanan kesehatan penduduk miskin, serta strategi penanggulangan kemiskinan berbasis dusun.

Kata Kunci : Kebijakan, Kemiskinan, Pemerintah Kota Batu.

ABSTRACT

Reza Pratama, Graduate Program, Department of Political Science, Faculty of Social and Political Sciences, University of Brawijaya, Malang, 2016. Batu City's Government Policies in Resolve Poverty. Team Supervisor: Dr. Hilmy Mochtar, MS., And Taufik Akbar, S.IP., M.IP.

This research seeks to analyze the policy Batu City Government in tackling poverty. As released by the Central Statistics Agency (BPS) in East Java in number in 2013, the City of Stone has managed to become the city with the lowest poverty rate in East Java province. This study assessed using qualitative descriptive method of selection techniques purposively informant accompanied by triangulation as engineering data validity checking.

Poverty in Kota Batu can be suppressed by various poverty reduction policies launched by the City of Stone, in which it is done by the regional work units (SKPD) related. Policy Directions for Poverty Reduction here aims to boost economic growth that includes and can be enjoyed as much as many people, especially the poor. This policy direction implemented by improving and developing the economic growth potential in sectors that have an impact on poverty reduction significantly.

The results of this study indicate that the role of the Batu City Government in alleviating poverty is to create programs that are expected to unravel the problems of poverty that exist. Such programs include, Solid works productive skills to the younger generation, expansion of labor, independent business informal sector (UMSI), enhancement of partnerships for micro, small and medium enterprises (SMEs), house surgeon, health care of the poor, as well as poverty reduction strategies based hamlets.

Keywords : Policy, Poverty, Batu City's Government



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan dalam bidang ekonomi di Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada masalah kemiskinan. Pada umumnya di negara berkembang seperti Indonesia permasalahan pendapatan yang rendah dengan masalah kemiskinan merupakan permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi. Kita ketahui bersama kemiskinan adalah salah satu permasalahan di negeri ini. Kemiskinan merupakan sebuah permasalahan sosial yang sangat kompleks dan harus segera mendapat formula yang tepat agar dapat terurai. Masyarakat miskin sesuai karakteristiknya umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya pada kegiatan ekonomi, sehingga semakin tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi.

Definisi kemiskinan menurut John Friedman adalah bahwa kemiskinan merupakan ketidaksamaan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial, yang dimaksud basis kekuasaan sosial menurut Friedman meliputi:¹

1. Modal produktif atas aset, misalnya tanah perumahan, peralatan dan kesehatan.
2. Sumber keuangan, seperti income dan kredit yang memadai.
3. Organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, seperti koperasi

¹ Bagong Suyanto, 2013, *Anatomi Kemiskinan*, Malang: Intrans Publishing, hlm. 2.

4. *Network* atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan dan ketrampilan yang memadai.
5. Informasi-informasi yang berguna untuk kehidupan.

Kemiskinan pada umumnya identik dengan kondisi kekurangan sumber daya atau pemasukan (*income*), fenomena kemiskinan itu sendiri pada hakikatnya merupakan suatu fenomena yang hadir di tengah masyarakat.² Persoalan kemiskinan bukan hanya berdimensi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, politik juga ideologi. Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti proper, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, bahwa kemiskinan adalah suatu *intergrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: kemiskinan, ketidakberdayaan, kerentanan menghadapi situasi darurat, ketergantungan, dan keterasingan baik secara geografis maupun sosiologis.

Berkaitan dengan sifat kemiskinan yang multi dimensi, maka kemiskinan telah menyebabkan dampak yang juga beragam dalam kehidupan nyata, antara lain:³ (1) secara sosial ekonomi dapat menjadi beban masyarakat, (2) rendahnya kualitas dan produktivitas masyarakat, (3) rendahnya partisipasi masyarakat, (4) menurunnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, (5) menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan (6) kemungkinan merosotnya mutu generasi yang akan datang.

² Prof. Yohanes Surya, Ph.D, 2008, *Solusi Untuk Indonesia*, Tangerang: PT. Kandel, hlm. 3-1-2.

³ Tibyan, 2010, *Analisis Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sragen*, Surakarta: Tesis Universitas Sebelas Maret, hlm. 18.

Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu.

Ada beberapa landasan terhadap pengentasan kemiskinan, UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1 berbunyi Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Yang dimana dapat dijelaskan maksud dari pasal tersebut adalah bahwa negara dalam hal ini diwajibkan memenuhi atas kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Disamping itu, UU nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 20 huruf a menyatakan; salah satu tujuan penanggulangan kemiskinan adalah untuk meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin. Peraturan mengenai penanggulangana kemiskinan kemudian diturunkan ke dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usahadan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Setiap permasalahan timbul pasti karna ada faktor yang mengiringinya yang menyebabkan timbulnya sebuah permasalahan, begitu juga dengan masalah kemiskinan yang dihadapi oleh negara indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan yaitu : 1) Pendidikan yang Terlampau

Rendah, tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja. 2) Laju Pertumbuhan Penduduk, pertumbuhan penduduk Indonesia terus meningkat di setiap 10 tahun menurut hasil sensus penduduk. Meningkatnya jumlah penduduk membuat Indonesia semakin terpuruk dengan keadaan ekonomi yang belum mapan. Jumlah penduduk yang bekerja tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan. Penghasilan yang minim ditambah dengan banyaknya beban ketergantungan yang harus ditanggung membuat penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. 3) Malas Bekerja, adanya sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib) menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja. 4) Keterbatasan Sumber Alam, suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal ini sering dikatakan masyarakat itu miskin karena sumberdaya alamnya miskin. 5) Terbatasnya Lapangan Kerja, keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara faktual hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan. 6) Keterbatasan Modal, seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan. 7) Beban Keluarga, seseorang yang mempunyai



anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi. 8) Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja dan Pengangguran.

Secara garis besar penduduk suatu negara dibagi menjadi dua yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yang tergolong sebagai tenaga kerja ialah penduduk yang berumur didalam batas usia kerja. Batasan usia kerja berbeda-beda disetiap negara yang satu dengan yang lain. Batas usia kerja yang dianut oleh Indonesia ialah minimum 10 tahun tanpa batas umur maksimum. Jadi setiap orang atau semua penduduk kesenjangan dikatakan lunak, distribusi pendapatan nasional dikatakan cukup merata. Pendapatan penduduk yang didapatkan dari hasil pekerjaan yang mereka lakukan relatif tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan ada sebagian penduduk di Indonesia mempunyai pendapatan yang berlebih. 9) Kurangnya perhatian dari pemerintah, pemerintah yang kurang peka terhadap laju pertumbuhan masyarakat miskin dapat menjadi salah satu faktor kemiskinan. Pemerintah tidak dapat memutuskan kebijakan yang mampu mengendalikan tingkat kemiskinan di negaranya. 10) Distribusi yang tidak merata secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah

Dalam upaya menganalisa peran & strategi pemerintah dalam menekan angka kemiskinan, penulis mengacu kepada data tabel urutan angka prosentase



kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa timur yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Berikut adalah penjabaran data tabelnya:

Tabel 1.1 Urutan Kabupaten/Kota se Jawa Timur berdasarkan angka prosentase kemiskinan tertinggi

Kab. Sampang	27,08
Kab. Bangkalan	23,23
Kab. Sumenep	21,22
Kab. Probolinggo	21,21
Kab. Pamekasan	18,53
Kab. Tuban	17,23
Kab. Pacitan	16,73
Kab. Lamongan	16,18
Kab. Bojonegoro	16,02
Kab. Ngawi	15,45
Kab. Bondowoso	15,29
Kab. Gresik	13,94
Kab. Situbondo	13,65
Kab. Nganjuk	13,60
Kab. Trenggalek	13,56
Kab. Kediri	13,23
Kab. Madiun	12,45
Kab. Magetan	12,19

Kab. Lumajang	12,14
Kab. Ponorogo	11,92
Kab. Jember	11,68
Kab. Malang	11,48
Kab. Pasuruan	11,26
Kab. Jombang	11,17
Kab. Mojokerto	10,99
Kab. Blitar	10,57
Kab. Banyuwangi	9,61
Kab. Tulungagung	9,07
Kota Probolinggo	8,55
Kota Kediri	8,23
Kota Pasuruan	7,60
Kota Blitar	7,42
Kab. Sidoarjo	6,72
Kota Mojokerto	6,65
Kota Surabaya	6,00
Kota Madiun	5,02
Kota Malang	4,87
Kota Batu	4,77
Jawa Timur	12,73

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur diolah penulis

Berdasarkan data diatas maka kita ketahui angka kemiskinan di Kota Batu

Sangat rendah, dimana tingkat prosentasenya sebesar 4,77%, sedangkan tingkat prosentase kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Sampang dengan tingkat prosentase kemiskinan sebesar 27,08%. Adapun rata-rata tingkat kemiskinan di Jawa Timur sebesar 12,73%. Mengacu pada rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi, ada beberapa Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat prosentase kemiskinan dibawah 12,73%, diantaranya Kota Batu, Kota Malang, hingga Kabupaten Madiun. Dari data diatas Kota Batu merupakan Kota dengan tingkat prosentase kemiskinan terendah, dimana bisa dikatakan Kota Batu berhasil menekan angka kemiskinan. Hal tersebut yang kemudian mendasari penulis untuk melakukan penelitian dengan pembahasan mengenai kebijakan Pemerintah Kota Batu dalam menanggulangi kemiskinan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah yaitu bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Batu dalam menanggulangi kemiskinan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi, menganalisis kebijakan Pemerintah Kota Batu dalam menanggulangi kemiskinan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

- a) Sebagai masukan bagi Pemerintah Kota Batu dalam menyusun program penanggulangan kemiskinan di Wilayah Kota Batu.

b) Sebagai pembanding bagi peneliti lain yang ingin meneliti permasalahan yang sama, serta untuk mengetahui dan untuk mengembangkan analisis yang lebih baik dalam memahami permasalahan yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Teori Kebijakan

Dalam teori kebijakan terdapat beberapa sub pembahasan. Dalam penelitian kali ini, penulis mengambil dua sub pembahasan, yaitu teori kebijakan kelembagaan dan teori kebijakan proses. Teori kebijakan kelembagaan menurut R. Dye adalah sebuah teori yang secara sederhana mengatakan bahwa tugas membuat kebijakan adalah tugas pemerintah. Oleh karena itu, apapun cara yang dibuat oleh pemerintah pada dasarnya dapat dikatakan sebagai kebijakan publik. Teori ini merupakan teori yang paling sederhana dalam konsep kebijakan publik, karena teori ini hanya mendasarkan pada fungsi-fungsi kelembagaan dan pemerintah di setiap sektor dan tingkat dalam merumuskan kebijakan. Ada 3 hal yang membenarkan teori ini, yaitu pemerintah memang sah membuat kebijakan publik, fungsi tersebut bersifat universal, karena pemerintah memiliki hak memonopoli fungsi mengatur (koreksi) dalam proses kegiatan publik. Teori kelembagaan pada dasarnya merupakan derivasi dari ilmu politik tradisional yang menekankan pada struktur daripada proses politik.⁴

Dalam teori kelembagaan ini perhatian lebih banyak terarahkan kepada bagaimana struktur organisasi dari pemerintahan, dan tidaklah begitu banyak tertuju kepada hubungan antara kebijaksanaan pemerintah dengan lembaga-lembaga pemerintah. Sehingga oleh karena itu penelitian atau pertimbangan lebih

⁴ Harbani Pasolong, 2008, *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta, hlm. 36.

tertuju pada: organisasi pemerintah serta bagaimana strukturnya, apa tugas-tugas lembaga pemerintah, serta bagaimana fungsinya lembaga-lembaga itu. Dengan teori yang demikian itulah, maka kita mengenal suatu definisi yang dikemukakan oleh Thomas R Dye yaitu *public policy is whatever governments choose to do or not to do*. Yang dimaksud adalah bahwa kebijaksanaan pemerintah itu adalah apa saja yang telah dipilih dan ditetapkan untuk dilakukan atau tidak dilakukannya.⁵

Studi kelembagaan pemerintah merupakan salah satu perhatian ilmu politik tertua. Kehidupan politik umumnya berkisar pada lembaga legislatif, eksekutif, pengadilan, dan partai politik; lebih jauh lagi kebijakan publik awalnya berdasarkan kewenangannya ditentukan dan dilaksanakan oleh lembaga pemerintah. Tidak mengherankan kemudian bila ilmuwan politik banyak mencurahkan perhatian pada pendekatan kelembagaan ini. Secara tradisional pendekatan kelembagaan menitikberatkan pada penjelasan lembaga pemerintah dengan aspek yang lebih formal dan legal yang meliputi organisasi formal, kekuasaan legal, aturan prosedural, dan fungsi atau aktivitasnya.⁶

Sedangkan teori yang selanjutnya adalah teori kebijakan proses. Teori ini berasumsi bahwa politik merupakan sebuah aktivitas sehingga mempunyai proses. Untuk itu, kebijakan publik adalah proses politik yang menyertakan rangkaian kegiatan berikut:⁷

⁵ Dr. Drs. H . Soenarko Setyodarmodjo, MPA, 2000, *Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 261.

⁶ Leo Agustino, S.Sos., M.Si, 2014, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, hlm. 26.

⁷ Harbani Pasolong, 2008, *Loc. Cit.*



1. Identifikasi permasalahan, yaitu mengemukakan tuntutan agar pemerintah mengambil tindakan
Menata agenda formulasi kebijakan, yaitu memutuskan isu apa yang dipilih dan permasalahan apa yang hendak dikemukakan
2. Perumusan proposal kebijakan, yaitu mengembangkan proposal kebijakan untuk menangani masalah tersebut
3. Legitimasi kebijakan, yaitu memilih satu proposal yang dinilai terbaik untuk kemudian mencari hubungan politik agar dapat diterima sebagai sebuah aturan.
4. Implementasi kebijakan, yaitu mengorganisasikan birokrasi, menyediakan pelayanan dan pembayaran, dan penggunaan pajak
5. Evaluasi kebijakan, yaitu melakukan studi program, melaporkan outputnya, mengevaluasi pengaruh (*impact*) dan kelompok sasaran dan non-sasaran, memberikan rekomendasi penyempurnaan kebijakan.

Teori ini memberikan rujukan tentang bagaimana kebijakan dibuat atau seharusnya dibuat, namun memberikan tekanan pada substansi seperti apa yang harus ada. Teori dengan model proses ini dapat kita lihat secara sederhana seperti yang telah dikemukakan oleh Randall B Ripley dengan menampilkan empat unsur yang penting dalam proses pengambilan kebijaksanaan. Empat unsur tersebut adalah:⁸

1. Lingkungan (*enviromental*)
2. Pengertian pelaku-pelaku kebijaksanaan tentang lingkungan itu (*policy actors perceptions of environtment*)
3. Kegiatan pemerintah (*government policy activity*)

⁸ *Ibid.*

4. Kegiatan masyarakat (*societal policy activity*)

2.2 Kerangka Konseptual

2.2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan Publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah, karena itu karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik tersebut diputuskan oleh seorang otoritas, yang dimana maksud dari otoritas disini adalah para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, dan para hakim. Mereka-mereka yang berotoritas dalam sistem politik dalam rangka memformulasi kebijakan publik itu adalah orang-orang yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada satu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Dari penjelasan mengenai kebijakan publik diatas, dapat disimpulkan mengenai karakteristik utama dari definisi kebijakan publik. Pertama, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak. Kedua, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. Misalnya, suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu, tetapi juga keputusan berikutnya yang berhubungan dengan penerapan dan pelaksanaannya. Ketiga, kebijakan publik



merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur segala hal yang berkaitan dengan masyarakat. Keempat, kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan. Secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun, padahal dalam konteks tersebut, keterlibatan pemerintah amat diperlukan. Terakhir, kelima, kebijakan publik paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah. Kebijakan publik yang bersifat memerintah kemungkinan besar mempunyai sifat memaksa secara sah, yang mana hal ini tidak dimiliki oleh kebijakan-kebijakan organisasi swasta.⁹

Kebijakan publik pada hakikatnya merupakan sebuah aktivitas yang khas, dalam artian ia mempunyai ciri-ciri tertentu yang agaknya tidak dimiliki oleh kebijakan jenis lain. Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan-kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu lazimnya dipikirkan, didesain, dirumuskan dan diputuskan oleh mereka yang menurut David Easton disebut sebagai orang-orang yang memiliki otoritas (*public authorities*) dalam sistem politik. Dalam sistem politik/ masyarakat tradisional yang sederhana, mereka itu contohnya para ketua adat atau ketua suku. Sedangkan di sistem politik atau masyarakat modern yang kompleks, mereka itu adalah para eksekutor, legislator, hakim, administrator, dan sejenisnya. Mereka inilah menurut Easton merupakan orang-orang yang dalam kesehariannya terlibat langsung dalam

⁹ Leo Agustiono, S.Sos., M.Si, 2014, *Op. Cit*, hlm. 8.

urusan-urusan politik dari sistem politik, dan dianggap oleh sebagian besar warga sistem politik itu sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan bertanggung jawab atas urusan-urusan politik tadi.

Mengingat posisi strategisnya yang demikian itu mereka dengan sendirinya dianggap berhak untuk mengambil tindakan-tindakan atas nama warga sistem politik, sepanjang tindakan-tindakan tersebut masih berada dalam batasan koridor-koridor peran dan kewenangan mereka. Di negara-negara yang menganut paham demokrasi konstitusional, menurut Gerston, kebijakan publik itu dibuat dan dijalankan oleh orang yang telah diberi wewenang untuk bertindak dengan persetujuan populer dan sesuai dengan norma-norma dan prosedur. Di negara-negara demokratis seperti itu kebanyakan para pembuat kebijakan publik terdiri dari pejabat-pejabat yang dipilih (*elected officials*).¹⁰ Dalam konteks politik seperti itu, para pejabat terpilih tadi, baik yang menempati posisinya di lembaga-lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) maupun lembaga eksekutif (presiden/wakil presiden), memainkan peran penting dalam proses pembuatan kebijakan. Kendati demikian, pada setiap sistem politik modern tentu ada pula pejabat-pejabat pembuat kebijakan yang menduduki posisinya justru bukan dipilih, melainkan diangkat (*appointed*). Oleh sebab itu, baik langsung atau tak langsung perilaku mereka harus akuntabel, bertanggung jawab pada publik. Sebagai konsekuensinya, tindakan-tindakan apapun yang mereka lakukan akan selalu menjadi sorotan dan pertimbangan publik.

¹⁰ Prof. Dr. H. Solichin Abdul Wahab, M.A, 2015, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 18-19.

Kebijakan publik (*public policy*) sebagai suatu keputusan senantiasa berwawasan kehari-depan atau bersifat futuristis. Untuk menanggapi kepentingan masyarakat, yang dalam kondisi dan situasi tertentu nampak sebagai masalah, maka kebijakan publik sebagai suatu keputusan haruslah di tetapkan dan dilaksanakan tepat pada waktunya. Kita mengetahui bahwa keinginan-keinginan dan pendapat dalam masyarakat itu bermacam-macam, ada yang sama, ada yang berbeda, malahan ada yang bertentangan. Karena itulah Dimock menekankan definisinya sebagai *reconciliation* dan *crystallization* dari pendapat-pendapat dan keinginan-keinginan tersebut

Berhubungan dengan hal itu, tidak jaranglah banyak kesulitan dalam pengambilan keputusan tersebut, sedang pada umumnya setiap keputusan pastilah akan menimbulkan pengorbanan. Hal itu berarti bahwa keputusan yang ditetapkan sering kali tidak memenuhi seluruh keinginan dan kehendak masyarakat. Sedang keputusan harus ditetapkan (*adopted, legitimated*), dan malahan haruslah ditetapkan dan dilaksanakan (*implemented*) tepat pada waktunya.

Kebijakan publik di daerah merupakan kebijakan pemerintah daerah yang menyangkut harat dan martabat masyarakat di daerahnya. Penyusunan kebijakan tersebut diperlukan untuk menyelaraskan perencanaan daerah dengan potensi sumber daya yang ada, sehingga akan terwujud pembangunan yang efisien, efektif dan berhasil guna. Kebijakan di daerah disusun sebagai bagian dari strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam mewujudkan Visi dan Misi daerah tersebut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, layanan publik dan daya saing sebagaimana amanat otonomi daerah, serta meningkatkan semangat persatuan dan

kesatuan bangsa dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan serta mewujudkan supremasi hukum dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Kebijakan publik diharapkan mampu memelihara integrasi nasional dan keutuhan bangsa Indonesia. Dengan otonomi daerah dapat mewujudkan hubungan kekuasaan menjadi lebih adil, proses demokrasi di daerah berjalan baik dan adanya peningkatan kesejahteraan di daerah. Daerah memiliki kepercayaan kepada pemerintah pusat yang akhirnya dapat memperlancar pembangunan bangsa melalui keutuhan nasional.

2.2.2 Peran

Peran merupakan suatu agensi yang terdapat dalam struktur sosial yang membentuk sebuah perwakilan, hal ini ditandai dengan terdapatnya norma yang membahas mengenai persoalan sosial dan tanggung jawab dalam struktur masyarakat.¹¹ Adapun pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam

¹¹ Roger Scruton, 2013, *Kamus Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 830.

kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (role). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan.¹²

2.2.3 Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD berdasarkan asas otonomi serta tugas pembantuan dengan menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana yang dimaksud dalam UUD RI 45'.¹³ Setiap pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia dipilih secara demokrasi, diantaranya Gubernur, Bupati dan Walikota yang masing-masing berperan sebagai kepala pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota. Setiap Kepala daerah tersebut dibantu dan didampingi oleh seorang wakil. Keduanya, baik Kepala daerah dan wakilnya mempunyai tanggung jawab, kewajiban, wewenang, tugas dan larangan yang harus dipatuhi.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan.¹⁴ Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa peraturan daerah. Hubungan kemitraan

¹² Anonim, dapat diakses di <http://digilib.unila.ac.id/85/8/BAB%20II.pdf>, diakses pada 24 januari 2016.

¹³ Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2.

¹⁴ Tjahjanulin Domai, 2011, *Desentralisasi*. Malang: UB Press, hlm. 7.

bermakna bahwa antara pemerintah daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga tersebut membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung dalam melaksanakan fungsi masing-masing. Peranan pemerintah daerah salah satunya adalah melaksanakan otonomi daerah dengan sebaik-baiknya, adapun pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia¹⁵. Adapun salah satu tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk mengembangkan mekanisme demokrasi di tingkat daerah dalam bentuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah setempat maupun untuk mendukung kebijaksanaan politik nasional dalam era reformasi saat ini.

2.2.4 Kemiskinan

Definisi tentang kemiskinan telah mengalami perluasan, seiring dengan semakin kompleksnya faktor penyebab, indikator maupun permasalahan lain yang melingkupinya. Kemiskinan tidak lagi hanya dianggap sebagai dimensi ekonomi melainkan telah meluas hingga kedimensi sosial, kesehatan, pendidikan dan politik. Berikut merupakan jenis-jenis kemiskinan:

¹⁵ Undang Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6.

1. Kemiskinan struktural

Merupakan kemiskinan yang disebabkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang belum pro rakyat. Kemiskinan struktural bukan karena kemalasan si miskin atau etos kerja, tetapi karena sistem sosial, politik dan ekonomi negara yang menyebabkan satu atau banyak kelompok termarginalkan. Kemiskinan struktural yang muncul bukan karena ketidakmampuan si miskin untuk bekerja (malas), melainkan karena ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja. Struktur sosial tersebut tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber-sumber yang tersedia, baik yang disediakan oleh alam, pemerintah maupun masyarakat yang ada disekitarnya. Mereka yang tergolong dalam kelompok ini adalah buruh tani, pemulung, penggali pasir dan mereka yang tidak terpelajar dan tidak terlatih. Pihak yang berperan besar dari terciptanya kemiskinan struktural ini adalah pemerintah, karena pemerintah yang memiliki kekuasaan dan kebijakan cenderung membiarkan masyarakat dalam kondisi miskin, tidak mengeluarkan kebijakan yang pro masyarakat miskin, jikapun ada lebih berorientasi pada proyek, bukan pada pembangunan kesejahteraan. Sehingga tidak ada masyarakat miskin yang 'naik kelas', artinya jika pada awalnya buruh, nelayan, pemulung maka selamanya menjadi buruh nelayan dan pemulung, karena tidak ada upaya dalam menaikkan derajat dan kemampuan mereka baik itu dalam kesempatan pendidikan atau pelatihan.

2. Kemiskinan Kultural

Sedangkan kebudayaan kemiskinan, merupakan kemiskinan yang muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin, seperti malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja, atau mungkin adanya budaya hedonisme, dan sebagainya. Ciri dari kebudayaan kemiskinan ini adalah masyarakat enggan mengintegrasikan dirinya dalam lembaga-lembaga utama, sikap apatis, curiga, terdiskriminasi oleh masyarakat luas. Dalam komunitas lokal ditemui ada rumah yang bobrok, penuh sesak dan bergerombol. Ditingkat keluarga, masa kanak-kanak cenderung singkat, cepat dewasa, cepat menikah. Pada individu mereka ada perasaan tidak berharga, tidak berdaya dan rendah diri akut.

3. Kemiskinan Rasional

Merupakan suatu kemiskinan yang disebabkan oleh keterbatasan kualitas maupun kuantitas SDA dan SDM, tidak adanya/ hilangnya sumber daya alam yang menguntungkan dan kurangnya keahlian dan kualitas sumber daya manusianya mau tidak mau menjadi penyebab terjadinya kemiskinan rasional. Selain itu pula bisa diakibatkan oleh musibah, bencana alam dan bencana-bencana lainnya, seperti tahun 2004 ketika terjadi tsunami di Aceh, suka tidak suka masyarakat yang terkena tsunami harus kehilangan harta benda mereka dan hidup dengan kekurangan, atau mungkin sama halnya dengan korban amuk massa dan sebagainya. Juga dalam konsep roda kehidupan, dimana ada saatnya seorang pemilik perusahaan yang jatuh miskin dikarenakan perusahaannya merugi,

berubahnya seseorang yang kaya menjadi miskin karena sebab dan akibat yang masuk akal.

Definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh John Friedman adalah bahwa kemiskinan merupakan ketidakseimbangan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Adapun basis kekuasaan sosial yang dimaksud adalah:¹⁶

1. Modal produktif atas aset, misalnya tanah perumahan, peralatan, dan kesehatan
2. Sumber keuangan, seperti income dan kredit yang memadai
3. Organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, seperti koperasi
4. Network atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan dan ketrampilan yang memadai.
5. Informasi-informasi yang berguna untuk kehidupan.

Pengertian tentang kemiskinan secara garis besar bisa dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan kemiskinan relatif adalah kemiskinan dilihat dari aspek ketimpangan sosial, karena ada orang yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya (lingkungannya). Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah maka akan semakin besar pula jumlah

¹⁶ Bagong Suyanto, *loc. Cit.*

penduduk yang dapat dikategorikan miskin, sehingga kemiskinan relatif erat hubungannya dengan masalah distribusi pendapatan.

kemiskinan dapat terjadi akibat sistem ekonomi yang berlaku karena yang kuat menindas yang lemah, tidak adanya sumber pendapatan yang memadai bagi golongan yang bersangkutan, struktur pemilikan, dan penggunaan tanah, pola usaha yang terbelakang, dan pendidikan angkatan kerja yang rendah. Dengan rendahnya faktor-faktor diatas menyebabkan rendahnya aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Dengan rendahnya aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan berakibat terhadap rendahnya produktivitas dan pendapatan yang diterima, pada gilirannya pendapatan tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik minimum yang menyebabkan terjadinya proses kemiskinan.

Untuk kasus Indonesia diperkirakan ada empat faktor penyebab kemiskinan. Faktor tersebut yaitu: rendahnya taraf pendidikan, rendahnya taraf kesehatan, terbatasnya lapangan kerja dan kondisi keterisolasian. suatu keluarga menjadi miskin disebabkan oleh tiga faktor yaitu: faktor sumber daya manusia, faktor sumber daya alam, faktor teknologi. Sumber daya manusia ditentukan oleh tingkat pendidikan, dependensi ratio, nilai sikap, partisipasi, keterampilan pekerjaan, dan semuanya itu tergantung kepada sosial budaya masyarakat itu sendiri, kalau sosial budaya masyarakatnya masih terbelakang maka rendahlah mutu sumber daya manusianya. Sebaliknya kalau sosial budaya modern sesuai dengan tuntutan pembangunan maka tinggilah mutu sumber daya manusia tersebut. Selanjutnya dikatakan bahwa potensi suatu wilayah ditentukan oleh keadaan fisik, sarana dan prasarana, iklim, keseluruhan lahan atau keadaan air,



keadaan topografi dan sarana seperti irigasi, jalan transportasi, pasar, kesehatan (sanitasi), pendidikan, gudang, fasilitas pengolahan, kondisi pertanian, kondisi pertanian, lembaga keuangan dan perbankan dan lain-lain.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pembahasan penelitian kali ini bermula dari UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1 yang berbunyi Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Yang dimana dapat dijelaskan maksud dari pasal tersebut adalah bahwa negara dalam hal ini diwajibkan memenuhi atas kebutuhan-kebutuhan masyarakat sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1. Selain itu, terdapat Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 yang memiliki penjelasan bahwa :

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga

negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara, serta untuk menghadapi tantangan dan perkembangan kesejahteraan sosial di tingkat lokal, nasional, dan global, perlu dilakukan penggantian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Materi pokok yang diatur dalam Undang-

Undang ini, antara lain, pemenuhan hak atas kebutuhan dasar, penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara komprehensif dan profesional, serta perlindungan masyarakat. Untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Undang-Undang ini juga mengatur pendaftaran dan perizinan serta sanksi administratif bagi lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat.¹⁷

Kedua landasan tersebut diperkuat dengan adanya Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan yang berintikan pada strategi percepatan penanggulangan kemiskinan yaitu, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil, mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Pembahasan mengenai penelitian ini di fokuskan pada peran Pemerintah Kota Batu dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Pembahasan tersebut di analisis atas dasar teori kebijakan, dengan menggunakan konsep kebijakan publik, peran, pemerintah daerah dan kemiskinan. Serta metode penelitian deskriptif kualitatif yang ditujukan kepada Mohammad Rifki, SE., M.AP. selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial&Budaya (Kasubbid Perencanaan Sosial&Budaya) Bappeda Kota Batu, Vidorova Nurcahyani, SE., MM. Kepala

¹⁷ Penjelasan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009

Seksi Bantuan Perlindungan Sosial (Kasi Banlinsos) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu, serta Ernawati Wahyuningsih, SE. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat&Pembinaan Sosial (Kasubbag Kesra&Bina Sosial) Setda Kota Batu.

Penelitian ini menggunakan uji validitas data berupa triangulasi data yang ditujukan kepada informan diatas, sehingga dapat dihasilkan data penelitian yang valid dan mampu dipertanggungjawabkan. Penjabaran diatas dapat digambarkan melalui tabel berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

1. UUD 1945 Pasal 28 H Ayat 1
2. UU No. 11 Tahun 2009
3. Perpres No. 15 Tahun 2010

Peran Pemerintah Kota Batu dalam mengentaskan kemiskinan

Analisa didasarkan atas teori kebijakan (kelembagaan&proses), serta konsep kebijakan publik, peran, kemiskinan, dengan metode deskriptif

Penarikan Kesimpulan

(sumber: diolah penulis, 2016)

2.4 Penelitian Terdahulu

Dalam rangka proses penyusunan penelitian, tentunya diharuskan memiliki acuan dari penelitian terdahulu yang mana merupakan dasar dalam penentuan pembahasan yang akan diteliti dalam penelitian tersebut. Penelitian terdahulu dapat dijadikan acuan agar penelitian yang dilaksanakan tidak memiliki kesamaan dengan penelitian lainnya. Berdasarkan atas penjabaran tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang akan dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelian	Metode Penelitian	Perbedaan dengan penelitian penulis	Tahun
Nurul Jannah	Peran Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Community Development mengentaskan	Deskriptif Kualitatif	Perbedaan terletak pada fokus penelitian yang mana pada penelitian tersebut memfokuskan pada program pengentasan	2015

	<p>kemiskinan Pada Kelompok Ternak Kambing di Kampung Bumen Wetan, Dusun Gilang, Bantul, Jogjakarta. (Skripsi)</p>		<p>kemiskinan di kalangan kelompok ternak kambing</p>	
<p>Atu Nuri Amin</p>	<p>Efektifitas Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Di Kota Surabaya. (Skripsi)</p>	<p>Kuantitatif</p>	<p>Perbedaan terletak pada metode penelitian, yang mana pada penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif.</p>	<p>2010</p>

Penelitian terdahulu pertama yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurul Jannah dengan judul Peran Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Community Development mengentaskan kemiskinan Pada Kelompok Ternak Kambing di Kampung Bumen Wetan, Dusun Gilang, Bantul, Jogjakarta

Dalam penelitian kali ini, Nurul Jannah menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang mana metode ini juga sama digunakan oleh penulis. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian yang dilakukan oleh Nurul Jannah memfokuskan memfokuskan pada program pengentasan kemiskinan di kalangan kelompok ternak kambing, sedangkan penulis memfokuskan pada Kebijakan Pemerintah Kota Batu dalam menanggulangi kemiskinan.

Penelitian terdahulu kedua mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Atu Nuri Amin dengan judul Efektifitas Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Di Kota Surabaya. Pada penelitian terdahulu ini, Atu Nuri Amin menggunakan metode penelitian kuantitatif, yang mana metode tersebut merupakan salah satu pembeda penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dan mengedapankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.¹⁸ Dari definisi yang dikemukakan diatas terdapat beberapa poin penting yang mendasari definisi tersebut. Poin pertama adalah ilmiah yang berarti bahwa penelitian`kualitatif dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya dan dapat dipercaya kesahihannya (validitas dan reliabilitasnya), dapat bersifat objektif sekaligus subjektif. Poin kedua adalah konteks sosial yang berarti bahwa dalam penelitian kualitatif, fenomena yang diteliti merupakan satu kesatuan antara subjek dan lingkungan sosialnya. Tidak mungkin memisahkan antara subjek dan lingkungannya sosial karena kedua

Dalam pelaksanaannya penelitian kualitatif biasanya memakai teknik wawancara terbuka guna meneliti sikap, perasaan, maupun perilaku baik individu ataupun kelompok dengan menggunakan metode alamiah. Adapun ciri atau karakteristik dari penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Latar alamiah sebagai sumber data langsung

¹⁸ Haris Herdiansyah, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, hlm. 9.

¹⁹ Dra. Nurul Zuriah, M.Si, 2009, *Metodologi Pendidikan Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 93-95.

Penelitian kualitatif mengadakan penelitian pada konteks dari suatu keutuhan sebagaimana adanya tanpa dilakukan perubahan dan intervensi oleh peneliti.

Peristiwa (sosial, pendidikan) merupakan kajian utama penelitian kualitatif.

Dalam hal ini peneliti pergi atau berada di lokasi untuk memahami, mempelajari perilaku insani dalam konteks lingkungannya sebagaimana yang ditunjukkan.

2. Manusia merupakan alat (instrumen) utama pengumpul data

Penelitian kualitatif menghendaki peneliti atau dengan bantuan orang lain sebagai alat utama pengumpul data. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah mengadakan penyusunan terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Manusia sebagai alat (*human instrument*) dapat berhubungan dengan responden dan mampu memahami, menggapai, dan menilai makna dari berbagai bentuk interaksi yang ada di lapangan.

3. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif

Peneliti kualitatif menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan karena lebih mudah mengadakan penyesuaian dengan kenyataan yang berdimensi ganda, lebih mudah menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan subjek penelitian, memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak pengaruh yang timbul dari pola-pola nilai yang dihadapi.

4. Analisis data dilakukan secara induktif

Dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dengan demikian, temuan penelitian di lapangan yang kemudian dibentuk ke dalam bangunan teori, hukum, bukan dari teori yang telah ada, melainkan dikembangkan dari data lapangan (induktif)

3.2 Penetapan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian kali ini adalah di Kota Batu, yaitu di lingkungan kantor Pemerintah Kota Batu. Yang mana penelitian ini secara murni menyoroti mengenai kajian terhadap kenijakan Pemerintah Kota Batu dalam menanggulangi kemiskinan.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ditujukan pada kebijakan Pemerintah Kota Batu dalam menanggulangi kemiskinan. Kemiskinan di Kota Batu kita ketahui dari data BPS Provinsi Jawa Timur sangatlah rendah tingkat prosentasenya. Dimana tingkat prosentase tersebut terendah dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk meneliti mengenai kebijakan Pemerintah Kota Batu dalam menanggulangi kemiskinan.

3.4 Pemilihan Informan

Pada penelitian ini pemilihan informan dilakukan secara *purposive*, berikut merupakan nama informan pada penelitian ini:

- Mohammad Rifki, SE., M.AP. Kasubbid Perencanaan Sosial&Budaya Bappeda Kota Batu.
- Vidorova Nurcahyani, SE., MM. Kasi Banlinsos Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu.
- Ernawati Wahyuningsih, SE. Kasubbag Kesra&Bina Sosial Setda Kota Batu.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.) Melakukan wawancara kepada beberapa informan, yaitu, Kasi Banlinsos Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Batu, Kasubbid Perencanaan Sosial Budaya Bappeda Kota Batu, dan Kasubbag Kesra&Bina Sosial Setda Kota Batu.
- 2.) Dokumentasi merupakan teknik untuk mengumpulkan data dengan mengacu pada catatan, notulensi rapat, surat-surat dan sebagainya yang dalam penelitian ini berkaitan langsung dengan kebijakan Pemerintah Kota Batu dalam menanggulangi kemiskinan.

3.6 Teknik Analisa Data

Analisis data dilakukan dengan pemahaman induktif dan dilakukan melalui kajian pustaka. Analisis data dalam penelitian ini dimulai sejak awal sampai penyimpulan data dan dikerjakan secara intensif (rekapitulasi) dan menyeluruh. Data yang berupa kata-kata/kalimat dari sumber diolah menjadi kalimat-kalimat yang bermakna dan dianalisis secara kualitatif. Teknik analisis kualitatif yang dilakukan mengacu 3 komponen berurutan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penjabaran teknik analisa data penelitian ini mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1.) *Data collection* (pengumpulan data);

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara terhadap beberapa informan, yaitu : Kasi Banlinsos Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Batu, Kasubbid Perencanaan Sosial Budaya Bappeda Kota Batu, dan Kasubbag Kesra&Bina Sosial Setda Kota Batu.

2.) *Data display* (paparan data);

Penyajian data dilakukan dalam rangka mengorganisasikan data yang merupakan penyusunan informasi secara sistematis dari hasil reduksi data dimulai dari perencanaan, observasi kondisi, dan refleksi kondisi, penarikan kesimpulan data merupakan upaya pencarian makna data, mencatat keteraturan, dan penggolongan data. Data yang terkumpul disajikan secara sistematis dan perlu diberi makna sesuai dengan hasil yang didapatkan.

3.) *Data analysis* (analisa data); dan

Analisis data dilakukan dengan pemahaman induktif dan dilakukan melalui kajian pustaka. Analisis data dalam penelitian ini dimulai sejak awal sampai penyimpulan data dan dikerjakan secara intensif (rekapitulasi) dan menyeluruh. Data yang berupa kata-kata/kalimat dari sumber diolah menjadi kalimat-kalimat yang bermakna dan dianalisis secara kualitatif. Teknik analisis kualitatif yang dilakukan dalam 3 komponen berurutan : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4.) *Conclusion Drawing* (penarikan kesimpulan)

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan berdasarkan atas analisa data yang telah dilakukan sehingga dapat diambil kesimpulan yang akurat dan relevan atas data yang telah dikumpulkan.

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data berupa Triangulasi Data yang merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain melalui perbandingan serta mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan.

Triangulasi Data dalam penelitian ini difokuskan pada triangulasi dengan sumber. Triangulasi dengan sumber, dilakukan dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Penggunaan triangulasi dengan sumber dianggap paling sesuai dengan penelitian karena pada proses triangulasi dilakukan dengan perbandingan dan pengecekan kembali informasi dengan waktu dan alat yang berbeda dalam pelaksanaan penelitian yang ada.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

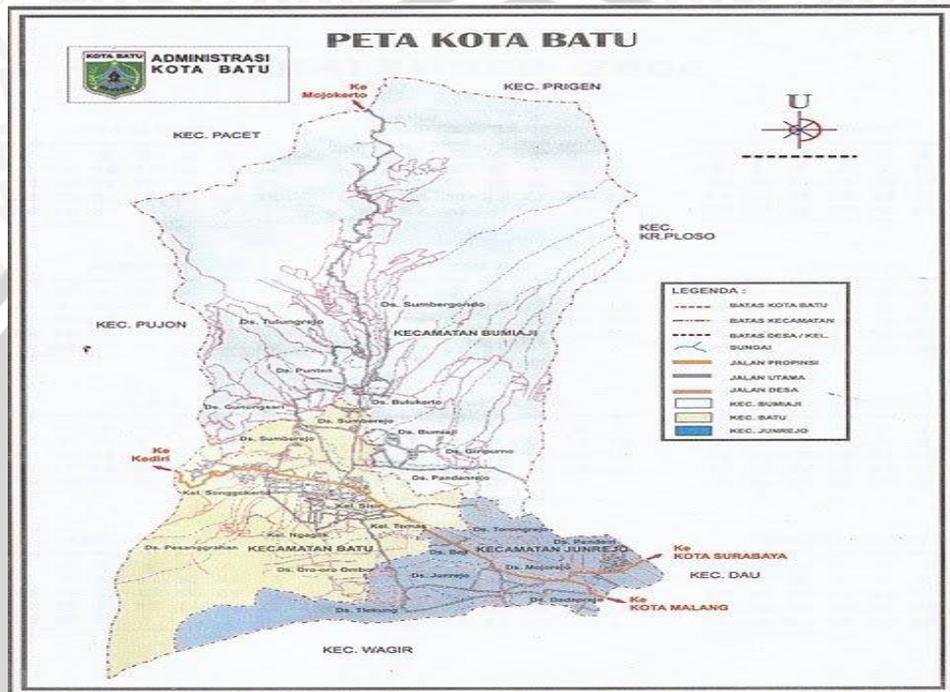
4.1 Profil Kota Batu

Kota Batu merupakan salah satu kota yang baru terbentuk pada tahun 2001 sebagai pecahan dari Kabupaten Malang. Sebelumnya wilayah Kota Batu merupakan bagian dari Sub Satuan Wilayah Pengembangan 1 (SSWP 1) Malang Utara. Kota ini sedang mempersiapkan diri untuk mampu melakukan perencanaan, pelaksanaan serta pengevaluasian proyek-proyek pembangunan secara mandiri sehingga masyarakat di wilayah ini semakin meningkat kesejahterannya. Kota Batu yang terletak 800 meter di atas permukaan air laut ini dikarunia keindahan alam yang memikat. Potensi ini tercermin dari kekayaan produksi pertanian, buah dan sayuran, serta panorama pegunungan dan perbukitan, sehingga Kota Batu dijuluki *the real tourism city of Indonesia oleh Bappenas*.

Kota Batu memiliki 3 (tiga) buah gunung yang telah dikenal dan telah diakui secara nasional. Gunung-gunung tersebut adalah Gunung Panderman (2010 m), Gunung Welirang (3156 m), Gunung Arjuno (3339 m) dan masih banyak lagi lainnya Dengan kondisi topografi pegunungan dan perbukitan tersebut menjadikan kota Batu terkenal sebagai daerah dingin. Batu memiliki suhu minimal antara 24,0 – 30,3°C dengan kelembaban udara sekitar 70 – 86 % disertai dengan kecepatan angin tertinggi 79,2 km/jam, oleh karenanya Kota Batu tidak memiliki perubahan musim yang drastic antara musim kemarau dan musim penghujan. Secara astronomis terletak di 122°17'10,90"-

122°57'11" Bujur Timur dan 7°44'55,11"-8°26'35,45 Lintang Selatan. Berikut wilayah Kota Batu digambarkan dengan peta:

Gambar 4.1 Peta Kota Batu



(sumber: Bappeda Kota Batu, disusun penulis)

- Batas wilayah utara : Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan
- Batas wilayah selatan : Kabupaten Malang
- Batas wilayah Barat : Kabupaten Malang
- Batas wilayah Timur : Kabupaten Malang

Kota Batu memiliki wilayah seluas 199,087 km² yang dibagi dalam 3 wilayah kecamatan (Batu, Junrejo, dan Bumiaji), 5 kelurahan, dan 19 desa, dengan jumlah penduduk 196.951 jiwa (2014). Semua desa/kelurahan di

Kota Batu dipimpin oleh kepala desa/lurah yang berjenis kelamin laki-laki.

Berikut tabel daftar desa-kelurahan pada tiga kecamatan di Kota Batu:

Tabel 4.1 Daftar desa-kelurahan di Kota Batu

	KECAMATAN BATU	KECAMATAN JUNREJO	KECAMATAN BUMIAJI
1	KELURAHAN NGAGLIK	DESA PENDEM	DESA PUNTEN
2	KELURAHAN SISIR	DESA JUNREJO	DESA BUMIAJI
3	KELURAHAN TEMAS	DESA BEJI	DESA TULUNGREJO
4	KELURAHAN SONGGOKERTO	DESA TLEKUNG	DESA GIRIPURNO
5	DESA ORO-ORO OMBO	DESA TORONGREJO	DESA GUNUNGSARI
6	DESA PESANGGRAHAN	DESA MOJOREJO	DESA PANDANREJO
7	DESA SUMBEREJO	KELURAHAN DADAPREJO	DESA BULUKERTO
8	DESA SIDOMULYO	DESA PENDEM	DESA SUMBERGONDO
9			DESA SUMBERBRANTAS

Susunan pemerintahan di Kota Batu dimulai dari pemerintah kota, kecamatan, kelurahan/desa, dusun, Rukun Warga (RW) dan terakhir Satuan Lingkungan Setempat (SLS) terkecil adalah Rukun Tetangga (RT). Dalam susunan pemerintahan Kota Batu tahun 2014 tidak terdapat perubahan jumlah dusun, RW dan RT yaitu terdapat 79 dusun, 238 RW dan 1127 RT. Jumlah dusun terbanyak terdapat di Kecamatan Bumiaji yaitu 45 dusun, kemudian

di Kecamatan Batu ada 19 dusun dan Kecamatan Junrejo memiliki 15 dusun. Sementara bila dilihat dari jumlah RT dan RW Kecamatan Batu merupakan kecamatan dengan jumlah RT dan RW terbanyak. Dari sisi ketinggian dari permukaan laut Kecamatan Bumiaji merupakan kecamatan yang paling tinggi yaitu 950 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Bumiaji juga merupakan kecamatan dengan luas wilayah paling luas dibandingkan dua kecamatan lainnya. Luas Kecamatan Bumiaji sendiri mencapai 60 persen dari total luas Kota Batu. Turun sedikit kita akan menemukan Kecamatan Batu yang berada di 897 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Batu merupakan kecamatan yang memiliki wilayah relatif paling datar diantara tiga kecamatan yang ada. Oleh karena itu di Kecamatan Batu inilah ibukota Kota Batu berada dan juga memiliki penduduk yang paling banyak. Luasnya hanya mencapai 22 persen dari total luas Kota Batu. Lalu Kecamatan Junrejo menjadi kecamatan yang paling rendah, letaknya berada di 739 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Junrejo menjadi kecamatan yang paling kecil luasnya dibandingkan dengan dua kecamatan lainnya.

Dengan letak Kota Batu yang relatif tinggi, menjadikan Kota Batu sebagai tempat yang potensial dan sangat cocok untuk usaha pertanian. Jenis tanah yang berada di Kota Batu sebagian besar merupakan andosol, selanjutnya secara berurutan kambisol, latosol dan aluvial. Tanahnya berupa tanah mekanis yang banyak mengandung mineral yang berasal dari ledakan gunung berapi, sifat tanah semacam ini mempunyai tingkat kesuburan yang tinggi. Komoditi yang

terkenal dari Kota Batu adalah produk-produk pertanian hortikultura buah-buahan, sayur-sayuran dan tanaman hias serta hasil peternakan berupa susu segar. Komoditi buah-buahan yang terkenal telah dihasilkan Kota Batu sejak dulu adalah apel. Beberapa jenis apel yang biasa dihasilkan di Kota Batu telah menjadi produk pertanian yang paling dicari dan menjadi komoditi yang memiliki harga bagus di pasaran. Jenis apel yang dihasilkan adalah apel Rome-Beauty, apel ana, dan apel manalagi. Ketiga komoditi ini menjadi primadona dengan ciri khas nya masing-masing. Selain rasanya yang enak, produk apel ini merupakan komoditi buah-buahan yang memiliki khasiat yang sangat baik untuk menjaga kesehatan.

Banyak sekali penduduk Kota Batu yang menjadikan usaha pertanian apel sebagai sumber mata pencaharian. Sebagian besar kebun-kebun apel berada di Kecamatan Bumiaji. Produk pertanian lain adalah susu segar. Penduduk Kota Batu banyak sekali yang memelihara sapi perah. Sebagian dari mereka menjadikan kegiatan pemeliharaan sapi perah sebagai pekerjaan tambahan selain mengolah lahan pertanian mereka sendiri atau mengolah lahan milik orang lain sebagai buruh tani. Kegiatan pemeliharaan sapi perah ini nampaknya menjadi kegiatan yang membuka peluang bagi sebagian penduduk untuk mendapatkan penghasilan karena di Kota Batu juga memiliki penduduk atau badan usaha yang mengolah susu segar menjadi produk-produk susu lain seperti susu pasteurisasi, permen susu, stik susu maupun produk-produk susu hasil fermentasi seperti yogurt. Sebagian besar penduduk Kota Batu yang mengusahakan peternakan sapi perah berada di Kecamatan Junrejo.

Produk-produk olahan susu dari Kota Batu sangat laku di pasaran. Para wisatawan dapat dengan mudah mendapatkan produk-produk hasil industri pengolahan makanan khas Kota Batu di toko-toko yang menjual oleh-oleh khas Malang. Sebagian besar toko-toko yang menjual aneka oleh-oleh khas Malang ini berlokasi di Kecamatan Batu. Tidak heran jika Bappenas memberikan julukan Kota Batu sebagai *the real tourism city of Indonesia*. Karena semua potensi daerah menjadi terintegrasi dalam menjadikan Kota Batu sebagai kota wisata yang lengkap. Kelengkapannya meliputi wisata alam, wisata edukasi di bidang pertanian hortikultura dan peternakan, wisata budaya dan wisata kuliner. Di Kota Batu pula kegiatan perekonomian penduduknya menjadi rangkaian kegiatan yang saling mengisi dari sector pertanian yang menghasilkan produk-produk pertanian yang hasilnya diserap oleh industri-industri pengolahan makanan yang hasilnya menjadi komoditi yang potensial di sektor perdagangan. Tak lupa sektor pariwisata, hotel dan restaurant menjadi hidup dengan kemudahan-kemudahan memperoleh bahan-bahan makanan yang dihasilkan di Kota Batu sendiri. Pemerintah Kota Batu tinggal memperhatikan keseimbangan antara kegiatan perekonomian dengan upaya-upaya menjaga kelestarian lingkungan.

4.2 Kemiskinan dan Perekonomian Kota Batu

Di Kota Batu masih banyak terdapat masyarakat miskin, Dibandingkan dengan tahun 2012 jumlah orang miskin di Kota Batu pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 0,30 % dimana jumlah penduduk miskin sebanyak 9.300

jiwa. Angka ini merupakan data yang bersifat makro. Jika dianalisis lebih lanjut, peningkatan ini disebabkan banyaknya orang miskin yang berada pada garis kemiskinan (miskin potensial). Hal ini rentan terhadap guncangan ekonomi dan sosial. Artinya, ketika terjadi gejolak ekonomi makro, misalnya inflasi maka, penduduk yang masuk kategori miskin potensial tersebut akan masuk dalam kategori miskin. Jadi kemiskinan di Kota Batu lebih banyak disebabkan oleh kondisi ekonomi secara makro. Namun di tahun 2015 masyarakat miskin di kota batu menurun angkanya menjadi 2339 jiwa. Berikut parameter kemiskinan yang diklasifikasikan oleh Pemerintah Kota Batu:

▪ **Kondisi ekonomi :**

1. Pendapatan Rendah (< Rp 600.000) atau di bawah UMK Kota Batu, sehingga kesulitan memenuhi kebutuhan yang layak.
2. Pendapatan tidak menentu.
3. Mata pencaharian penduduk miskin umumnya : buruh tani, buruh bangunan, buruh atau tenaga kasar, petani dengan lahan terbatas, bekerja tidak tetap (serabutan) atau pengangguran.
4. Pekerjaan tidak tetap atau menganggur.
5. Keterbatasan sumber daya (lahan pertanian, modal, tabungan/ aset, peralatan kerja dsb).
6. Penurunan produktivitas sumber mata pencaharian masyarakat seperti pertanian dan kerajinan; serta belum berkembangnya agro-industri.

- **Kondisi sosial :**

1. Ketidakberdayaan mengakses pelayanan dasar khususnya pendidikan dan kesehatan (ketidakmampuan sekolah lebih tinggi, ketidakmampuan menyekolahkan anaknya dan ketidakmampuan membayar biaya pengobatan).
2. Pendidikan relatif rendah.
3. Keterbatasan Ketrampilan.
4. Keterbatasan jasmani : sakit permanen, tua dan tidak produktif lagi, cacat.

- **Kondisi lingkungan :**

1. Rumah/tempat tinggalnya tidak layak huni (termasuk rumah kontrakan/sewa yang tidak layak huni).
2. Infrastruktur yang tidak memadai seperti jalan, drainase, jembatan penghubung.
3. Pemukiman kumuh dan tidak sehat (sanitasi yang buruk).
4. Kesulitan untuk memperoleh dan mendapatkan fasilitas air bersih.
5. Daerah rawan longsor.
6. Letak geografis yang jauh dan terpencil serta jauh dari aksesibilitas pelayanan.

Salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan. Gambaran kondisi ketenagakerjaan seperti persentase angkatan kerja yang bekerja, dan distribusi lapangan pekerjaan sangat berguna dalam melihat prospek ekonomi



suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat dievaluasi apakah benar-benar digerakkan oleh produksi yang melibatkan tenaga kerja daerah atau karena pengaruh faktor lain. Banyaknya penduduk yang bekerja akan berdampak pada peningkatan kemampuan daya beli. Peningkatan pendapatan penduduk sangat menentukan pemenuhan kebutuhan hidup yang lengkap.

Pada tahun 2013, jumlah penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas) di Kota Batu sebanyak 147.011 orang, yang terdiri dari angkatan kerja (penduduk yang bekerja dan penganggur) sebesar 103.743 orang dan bukan angkatan kerja (penduduk yang masuk kategori bersekolah, mengurus rumahtangga, dan lainnya) sebesar 43.268 orang. Dari 103.743 angkatan kerja di Kota Batu, sebanyak 101.339 orang terserap dalam lapangan pekerjaan, sedangkan sisanya 2.304 orang masih menganggur atau belum mempunyai pekerjaan. Lapangan pekerjaan di Kota Batu umumnya bergerak pada sektor: pertanian, industri, perdagangan, jasa dan lainnya (pertambangan, listrik, gas dan air, angkutan dan komunikasi, koperasi dan lembaga keuangan). Penyerapan tenaga kerja (usia 10 tahun ke atas) pada sektor industri mencapai 27,08%, pada sektor pertanian 20,66%, perdagangan 19,51 %, jasa 10,21 % dan pada sektor lainnya menyerap tenaga kerja 22,54%.

Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah angkatan kerja di Kota Batu sedikit mengalami peningkatan yaitu sebesar 2.013 orang (tahun 2012, jumlah angkatan kerja 101.733 orang). Sedangkan jumlah orang yang bekerja mengalami peningkatan sebesar 3.078 orang, sehingga angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan sebesar 1,09 persen poin, yaitu dari 3,41 persen pada

tahun 2012 menjadi 2,32 persen pada tahun 2013. Angka TPT di Kota Batu sebesar 2,32 persen tersebut telah melampaui target tahun berkenaan yakni 4,45% dan lebih kecil dibandingkan angka TPT Jawa Timur yaitu sebesar 4,33 persen.

Tabel 4.2

Kondisi Ketenagakerjaan di Kota Batu Tahun 2011-2014

Uraian	2011	2012	2013	2014
Penduduk Angkatan Kerja	104.644	101,773	105,445	106.777
Jumlah yang bekerja	96.491	98,261	103,024	104.177
Jumlah Penganggur	8.001	3,472	2,421	2.200
Tingkat Partisipasi Angk. Kerja (%)	69,33	70.09	70.58	70,38
Tingkat Kesempatan Kerja (%)	93,61	96.59	97.68	97,83
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,57	3.41	2.30	2,43

Sumber: Bappeda Kota Batu, 2015

Pada tahun 2011 jumlah pengangguran terbuka (TPT) di Kota Batu sebanyak 4,57 % kemudian turun menjadi 3,41 % pada tahun 2012 dan 2,30 tahun 2013. Angka ini mengalami kenaikan yang tidak signifikan sebesar 0,13 %

menjadi 2,43 % pada tahun 2014. Merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Batu untuk mampu menanggulangi tingkat pengangguran terbuka yang berfluktuasi tersebut. Melalui berbagai program dan kegiatan yang dirancang untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, maka tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dari 3,41% tahun 2012 menjadi 2,32% tahun 2013. Hal ini menunjukkan semakin berkembangnya perekonomian di Kota Batu karena semakin banyaknya investasi sehingga berdampak pada kegiatan perekonomian di sektor perdagangan dan jasa yang berakibat pada penyerapan tenaga kerja. Di masa mendatang diharapkan kondisi pengangguran semakin berkurang karena pemerintah kota Batu masih melakukan pembangunan tempat-tempat wisata, hotel dan mengembangkan kegiatan perekonomian yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang ada. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam hal ini adalah bagaimana menyiapkan tenaga kerja yang selama ini cenderung berorientasi ke sektor pertanian menjadi tenaga kerja yang siap pakai di sektor pariwisata, perdagangan, jasa, serta agro industri. Berdasarkan fakta di lapangan, hal ini lebih memperkuat paradigma agropolitan yang harus diwujudkan di seluruh wilayah Kota Batu.

Adapun tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Batu lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional dan bahkan Kota Batu mampu mencapai peringkat ke 2 (dua) di Provinsi Jawa Timur serta mencapai peringkat ke 4 (empat) pertumbuhan ekonomi secara Nasional. Berikut tabel pertumbuhan ekonomi Kota Batu dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan nasional.



Tabel 4.3 Pertumbuhan Ekonomi Kota Batu

No.	Keterangan	2009	2010	2011	2012	2013*)
1	Kota Batu (%)	6.99	7.52	8.04	8.25	8,02
2	Jawa Timur (%)	5.01	6.68	7.22	7.27	6.20
3	Nasional (%)	4.58	6.10	6.50	6.81	5.81

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur dan Kota Batu
Keterangan: *)Hasil analisis

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat secara berkelanjutan selama periode tersebut, menunjukkan adanya peningkatan perekonomian yang ditimbulkan berkembangnya ekonomi masyarakat Kota Batu, khususnya semakin menguatnya sektor riil dan usaha mikro, kecil dan menengah. Selain itu, meningkatnya perekonomian Kota Batu merupakan implikasi dari berbagai kebijakan prioritas pembangunan Pemerintah Kota Batu maupun Provinsi Jawa Timur serta kinerja sektor swasta yang menguntungkan, sehingga bisa menciptakan kondisi perekonomian Kota Batu yang semakin membaik.

Pendapatan perkapita masyarakat Kota Batu juga mengalami kenaikan dari beberapa tahun terakhir, Jumlah PDRB per Kapita ADHB tahun 2012 mencapai Rp. 21,51 Juta meningkat Rp. 2,29 juta per kapita dibandingkan tahun 2011 yang nilainya sebesar Rp. 19,22 Juta atau naik 11,90 Persen. Pada tahun 2013 PDRB per Kapita meningkat menjadi Rp.25,37 juta meningkat sebesar Rp. 3,86 juta atau 17,95 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah PDRB per Kapita ADHK tahun 2013 mencapai Rp.9,17 Juta meningkat 6,53 Persen atau Rp.561,96 ribu per kapita dibandingkan tahun 2012 sebesar Rp. 8,61 Juta.

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Kebijakan Pemerintah Kota Batu dalam Menanggulangi Kemiskinan

Strategi penanganan masalah kemiskinan diarahkan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Batu, Pemerintah Kota Batu disini memiliki formulasi khusus guna mengurangi masalah tersebut. Penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara sinergis dan sistematis agar seluruh warga masyarakat mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Oleh karena itu, sinergi seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan.

“Kemiskinan yang ada di Kota Batu bisa ditekan dengan berbagai program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan Pemerintah Kota Batu dan juga dicanangkan Pemerintah Provinsi maupun Pusat, yang mana program-program tersebut dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kota Batu.”²⁰

Pemerintah Kota Batu disini membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang diketuai oleh wakil walikota dan tim tersebut berisikan anggota dari berbagai SKPD terkait. Dimana TKPKD ini bertanggung jawab langsung kepada Walikota. Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dimana yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan dan dapat dinikmati sebanyak banyaknya masyarakat terutama masyarakat miskin. Berikut adalah contoh program-program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan Pemerintah Kota Batu:

²⁰ Ernawati Wahyuningsih, Wawancara, Batu, pada 22 April 2016.

1. Padat Karya Produktif

Padat Karya Produktif disini adalah sebuah program yang dilakukan oleh dinsosnaker guna yang bertujuan untuk memanfaatkan dan mengolah sumber daya alam yang ada di daerah tersebut menjadi suatu kegiatan yang produktif serta menghasilkan yang pada akhirnya masyarakat mampu mengolah sumber daya alam tersebut menjadi sumber mata pencaharian yang berkesinambungan. Program padat karya produktif sangat efektif dalam menyerap tenaga kerja penganggur maupun setengah penganggur dalam jumlah yang relatif banyak dengan membangun sarana produktif yang dapat memberikan manfaat peningkatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Kegiatan ini sangat bermanfaat karena dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat dengan mempekerjakan masyarakat setempat yang pada akhirnya dapat mengurangi penganggur maupun setengah penganggur. Dimana Pemerintah telah berhasil memberdayakan 450 orang baik penganggur dan miskin yang ada di Kota Batu.

2. Pelatihan ketrampilan bagi Generasi Muda

Pelatihan yang dilakukan dinsosnaker ini tentunya memiliki tujuan agar dapat memberdayakan generasi muda untuk berpartisipasi dalam pengentasan pengangguran dan kemiskinan, berpartisipasi dalam upaya mengurangi angka pengangguran, serta memberdayakan para pemuda usia produktif untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental sesuai dengan kebutuhan/peluang pasar kerja pada dunia usaha/dunia industri (DUDI) dan/atau berusaha mandiri. Dalam pengembangan masyarakat, pelatihan diberikan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dari warga masyarakat dalam

menghadapi tuntutan maupun perubahan lingkungan sekitarnya. Pemberian pelatihan bagi masyarakat bertujuan untuk memberdayakan, sehingga warga masyarakat menjadi berdaya dan dapat berpartisipasi aktif pada proses perubahan. Pelatihan dapat membantu orang atau masyarakat untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki. Dengan pelatihan juga dapat menimbulkan perubahan dalam kebiasaan-kebiasaan bekerja masyarakat, perubahan sikap terhadap pekerjaan, serta dalam informasi dan pengetahuan yang mereka terapkan dalam pekerjaannya sehari-hari. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 75.000.000.-

3. Peningkatan Kemitraan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan pengembangan Sarana Promosi

UMKM sangatlah penting untuk mendongkrak perekonomian masyarakat. Pemberdayaan UMKM merupakan upaya yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Usaha mikro sering disebut dengan usaha rumah tangga. Besarnya kredit yang dapat diterima oleh usaha adalah Rp 50 juta. Usaha mikro adalah usaha produktif secara individu atau tergabung dalam koperasi dengan hasil penjualan Rp 100 juta. Usaha mikro bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan ekonomi yang berkeadilan.²¹ Dalam hal ini Pemerintah Kota Batu memberikan bantuan dana atau modal bagi para pelaku UMKM serta memberikan ruang untuk promosi atau memasarkan

²¹ Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 3.

hasil daripada kegiatan UMKM tersebut. Dimana disini Pemerintah Kota Batu melakukan belanja anggaran di pos ini sebesar Rp. 1.834.102.500.-

4. Perluasan Tenaga Kerja, Usaha Mandiri Sektor Informal (UMSI)

Pemecahan masalah pengangguran tidak hanya dilakukan melalui kegiatan penempatan tenaga kerja di sektor formal, namun juga melalui upaya-upaya pembinaan dan fasilitasi kegiatan perluasan kesempatan kerja. Upaya perluasan kesempatan kerja antara lain dilakukan dengan pembinaan dan fasilitasi pembentukan wirausaha baru di sektor informal.

“Penciptaan wirausaha mempunyai nilai strategis karena mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas lapangan dan kesempatan kerja baru serta menopang perekonomian negara. Dalam hal ini Pemerintah Kota Batu melakukan kegiatan perluasan tenaga kerja dengan cara menggandeng sektor UMSI untuk merekomendasikan agar merekrut tenaga kerja yang ada di Batu, sehingga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat.”²²

5. Bedah Rumah

Program Bedah Rumah merupakan salah satu upaya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan yang bertujuan agar keluarga miskin memiliki rumah yang layak huni dan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal.

Program ini diprioritaskan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria antara lain adalah masuk dalam daftar rumah tangga sasaran, status tanah yang ditempati adalah hak milik serta rumahnya tidak layak huni.

“Adapun kriteria rumah tidak layak huni adalah sebagai berikut: Luas bangunan kurang dari 8 m², lantai tanah/bambu/rumbia/kayu kualitas rendah, dinding bambu/rumbia/kayu kualitas rendah, atap bambu/rumbia/kayu kualitas rendah, memasak dengan kayu bakar/arang, penerangan bukan listrik, sumber air minum sumur/sungai/air hujan, tidak

²² Vidorova Nurcahyani, Wawancara, Batu Pada 27 April 2016.

*memiliki kamar mandi/jamban/kakus. Pada tahun 2015, Pemerintah Kota Batu telah melakukan bedah rumah sebanyak 544 rumah.*²³

Anggaran pengeluaran untuk program ini di tahun 2015 sebesar Rp. 9.000.000.000.-

6. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Dusun.

Program Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Berbasis Dusun adalah Program Pemerintah Kota Batu untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan yang secara substansi berupaya mengembangkan keterpaduan, keselarasan dan sinergi pelaku (antar sektor, SKPD, Pelaku Usaha, dan masyarakat) serta sinergi antar program : Program Pembangunan Infrastruktur, Program Bedah Rumah dan Penataan Permukiman dan Lingkungan, Program Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Sosial, Program Peningkatan Perekonomian Masyarakat (pemberdayaan ekonomi) dengan lokasi sasaran Dusun-Dusun yang berada di daerah pedesaan dan jauh dari akses pelayanan. Untuk pelaksanaan Program diawali pada tahun 2010, yang dimana dinamakan Pilot Project Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Lingkungan di Kota Batu. Pilot Project dilaksanakan di Kecamatan Batu di Dusun Dresel, Desa Oro-oro Ombo, Dusun Toyomerto dan Desa Pesangrahan, di Kecamatan Bumiaji dilaksanakan di Dusun Brau, Desa Gunungsari, Dusun Kekep dan Desa Tulungrejo. Untuk tahun 2011 direncanakan program lanjutan dengan sasaran Dusun Gangsiran Puthuk Desa Tlekung Kecamatan Junrejo, Dusun Ngukir Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo, Dusun

²³ Ernawati Wahyuningsih, Wawancara, Batu Pada 24 April 2016.

Sumbersari Desa Sumberejo Kecamatan Batu dan Dusun Lemah Putih Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji.

Pada pencapaian program penanggulangan kemiskinan, khususnya pada lokasi pilot project yang terdiri dari 4 dusun di 4 desa yaitu di Dusun Gangsiran Puthuk di Desa Tlekung, Dusun Ngukir di Desa Torongrejo, Dusun Summersari di Desa Sumberejo, Dusun Lemah Putih di Desa Sumberbrantas telah dilaksanakan oleh 7 SKPD terkait. Secara keseluruhan dana yang dikucurkan untuk keempat dusun tersebut mencapai Rp 4.523.916.000.- yang diperuntukkan bagi pembangunan sarana prasarana dasar seperti jalan dan jembatan untuk mempercepat dan memberikan akses bagi warga miskin di dusun tertinggal.

Adapun program yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Bantuan Beras Miskin (Raskin)

Program Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin) adalah program dari pemerintah untuk mengurangi beban pengeluaran dari rumah tangga miskin sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan sosial beras murah dengan jumlah maksimal 15 kg/rumah tangga miskin/bulan dengan masing-masing seharga Rp. 1600,00 per kg di titik distribusi. Program Raskin merupakan subsidi pangan sebagai upaya dari Pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin. Tujuan program raskin adalah memberikan bantuan dan meningkatkan/membuka akses pangan keluarga miskin dalam rangka

memenuhi kebutuhan beras sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan di tingkat keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat pada tingkat harga bersubsidi dengan jumlah yang telah ditentukan dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Sasarannya adalah terbantu dan terbukanya akses beras keluarga miskin yang telah terdata dengan kuantum tertentu sesuai dengan hasil musyawarah desa/kelurahan dengan harga bersubsidi di tempat, sehingga dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan keluarga miskin.

Penetapan penerima manfaat Program RASKIN di Desa/Kelurahan menggunakan mekanisme Musyawarah Desa/Kelurahan yang dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Musyawarah Desa/Kelurahan dilakukan untuk menentukan nama-nama calon penerima manfaat untuk ditetapkan sebagai RTM penerima manfaat sesuai dengan sasaran. Musyawarah Desa/Kelurahan dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah dan diikuti oleh aparat Desa/Kelurahan (termasuk Kepala Dusun/Lingkungan, RW, RT), anggota Badan Permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan, institusi kemasyarakatan Desa/Kelurahan, tokoh-tokoh masyarakat (agama, adat, dll.) serta perwakilan Rumah Tangga Miskin. Untuk program raskin, Pemerintah Kota Batu hanya menganggarkan untuk proses fasilitasi distribusinya saja yaitu sebesar Rp. 413.360.000.-

2. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Kesehatan adalah hal yang sangat penting dimana kesehatan merupakan salah satu faktor terciptanya kesejahteraan sosial. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin diharapkan mampu membantu masyarakat yang kurang mampu ketika

sedang mengalami masalah kesehatan. Kelompok miskin pada umumnya mempunyai status kesehatan yang lebih rendah dibandingkan dengan status kesehatan rata-rata penduduk. Rendahnya status kesehatan penduduk miskin terutama disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan karena kendala geografis dan kendala biaya. Adapun program Pemerintah adalah memberikan fasilitas Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesda) kepada masyarakat miskin yang ada di Kota Batu. Program Jamkesda memberikan perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin setiap peserta program Jamkesda ini. Peserta Program Jamkesda adalah setiap orang miskin dan tidak mampu yang terdaftar dan memiliki kartu dan berhak mendapat pelayanan kesehatan. Para peserta Jamkesda ini mendapat keringanan yaitu iuran kesehatan mereka dibayar oleh Pemerintah yaitu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

5.1 Kajian Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Batu dalam Menanggulangi Kemiskinan

Kemiskinan adalah salah satu problem yang dihadapi oleh sebagian besar negara berkembang termasuk Indonesia. Sejak masa awal kemerdekaan hingga periode reformasi ini, telah banyak dilakukan usaha untuk mengurangi angka kemiskinan. Kemiskinan merupakan kondisi yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku.

Berkaitan dengan upaya penanggulangan masalah kemiskinan diperlukan

upaya yang memadukan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang tersebar di berbagai sektor. Penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara sinergis dan sistematis agar seluruh warga masyarakat mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Oleh karena itu, sinergi seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan. Masalah kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain:²⁴ pendapatan yang rendah, rendahnya akses atau kegagalan memenuhi kebutuhan dasar khususnya bidang pendidikan dan ketrampilan yang memadai guna mendapatkan lapangan kerja, tidak memiliki aset produksi dengan kekuatan sendiri, yang mana pendapatan masyarakat kurang cukup untuk dijadikan modal usaha. Lalu selanjutnya adalah masih terdapat masyarakat yang tidak memiliki lahan, sehingga pada umumnya mereka menjadi buruh tani. Karena pertanian bekerja atas dasar musiman, maka kesinambungan kerja menjadi kurang terjamin. Banyak diantara mereka lalu menjadi pekerja bebas yang berusaha apa saja, akibatnya dalam situasi penawaran kerja yang besar, maka tingkat upah menjadi rendah dan mereka terkungkung pada kehidupan di batas garis kemiskinan.

Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam penurunan angka kemiskinan, dilakukan secara bersama-sama oleh SKPD terkait di Kota Batu. Namun langkah dalam penanggulangan kemiskinan ini perlu juga diikuti oleh berbagai pihak, baik swasta, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi serta kelompok peduli lainnya untuk secara bersama-sama dalam pergerakan penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan

²⁴ Prayitno Hadi, 1986, *Petani Desa dan Kemiskinan*, Yogyakarta: BPFE, hlm. 37.

terintegrasi.

Pelaksanaan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dikoordinir oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dipimpin oleh Wakil Walikota dengan anggota Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Pada prinsipnya apa yang telah dilakukan Pemerintah Kota Batu sudah baik, dan memang Pemerintah Kota Batu benar-benar telah serius melakukan pengentasan kemiskinan di wilayahnya. Sesuai dengan konsep otonomi daerah yang memberikan kewenangan pada daerah untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri, maka apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu ini sudah tepat.

Program-program yang dibuat oleh Pemerintah Kota Batu tersebut bila dikaitkan dengan teori kelembagaan dan teori proses, maka yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu memang benar dan sesuai. Teori kebijakan kelembagaan menurut R. Dye adalah sebuah teori yang secara sederhana mengatakan bahwa tugas membuat kebijakan adalah tugas pemerintah.

Sedangkan teori yang selanjutnya adalah teori kebijakan proses. Teori ini berasumsi bahwa politik merupakan sebuah aktivitas sehingga mempunyai proses. Untuk itu, kebijakan publik adalah proses politik yang menyertakan rangkaian kegiatan berikut:²⁵

1. Identifikasi permasalahan, yaitu melakukan kegiatan monitoring mengenai permasalahan yang ada serta melakukan pemetaan masalah.

²⁵ Harbani Pasolong, 2008, *Loc. Cit.*

2. Perumusan proposal kebijakan, yaitu mengembangkan proposal kebijakan yang mana berisi program-program Pemerintah Kota Batu dalam menanggulangi kemiskinan
3. Legitimasi kebijakan, yaitu mengkoordinasikan antar SKPD dalam rangka persiapan program-program yang hendak akan di implementasikan kepada masyarakat
4. Implementasi kebijakan, yaitu melakukan implementasi program penanggulangan kemiskinan yang ada
5. Evaluasi kebijakan, yaitu melakukan studi program, melaporkan outputnya, serta melakukan evaluasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan.

BAB V**KESIMPULAN DAN SARAN****5.1 Kesimpulan**

Dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Batu, Pemerintah Kota Batu memiliki peran yang besar. Peran Pemerintah Kota Batu diantaranya adalah membuat formulasi khusus guna mengurai masalah tersebut. Dalam upaya menanggulangi masalah kemiskinan haruslah dilakukan secara sinergis dan sistematis agar seluruh warga masyarakat mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Oleh karena itu, sinergi seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan. Berbagai program yang dilakukan Pemerintah Kota Batu dalam menanggulangi kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Padat karya produktif
2. Pelatihan ketrampilan bagi generasi muda
3. Perluasan tenaga kerja, usaha mandiri sektor informal (UMSI)
4. Peningkatan kemitraan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)
5. Bedah rumah
6. Strategi penanggulangan kemiskinan berbasis dusun

Adapun program dari Pemerintah Pusat dan Provinsi adalah:

1. Bantuan beras miskin
2. Pelayanan kesehatan penduduk miskin



5.2 Saran

Secara umum apa yang telah dilakukan Pemerintah Kota Batu sudah tepat, strategi penanggulangan kemiskinan melalui berbagai macam program juga telah dilakukan. Namun yang paling penting disini adalah bagaimana agar program-program tersebut selalu dievaluasi agar dapat dilakukan penyempurnaan. Serta tentunya perlu dilakukan pendataan terhadap para rumah tangga sasaran yang terkena program tersebut setiap bulan, sehingga apa yang telah dilakukan pemerintah benar-benar bisa memberikan manfaat bagi masyarakat miskin yang ada di Kota Batu.

Pada penelitian kali ini kesulitan yang dihadapi adalah terbatasnya data yang di peroleh karena tidak bisa mengakses di tingkat kecamatan, hanya terpusat pada dinas-dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kota Batu. Saran bagi Pemerintah Kota Batu hendaknya kedepan bisa lebih terbuka, seperti kemudahan akses di tingkat kecamatan, sehingga bisa memudahkan peneliti yang akan melakukan penelitian serupa di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA**Daftar Pustaka Buku:**

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ali, Faried. 1997. *Metodologi Penelitian Sosial dalam Bidang Ilmu Administrasi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Domai, Tjahjanulin. 2011. *Desentralisasi*. Malang: UB Press.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Parsons, Wayne. 2008. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Prayitno, Hadi., dan Lincoln Arsyad. 1986. *Petani Desa dan Kemiskinan*. Yogyakarta: BPFE.
- Surya, Yohanes., dan Hokky Situngkir. 2008. *Solusi Untuk Indonesia*. Banten: Kendal.
- Suyanto, Bagong. 2013. *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*. Malang: Intrans Pub lishing.
- Wahab, Solichin Abdul. 2015. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zuriah, Nurul. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Daftar Pustaka Internet:

- Anonim, diakses di <http://digilib.unila.ac.id/85/8/BAB%20II.pdf>, diakses pada 24 januari 2016.

Daftar Pustaka Wawancara:

- Nurchayani, Vidorova Interview, 2016, “wawancara program pengentasan kemiskinan dinas sosial tenaga kerja”. Jl. Jenderal Sudirman 507 Batu.

Rifki, Mohammad Interview, 2016, “wawancara strategi pengentasan kemiskinan Pemerintah Kota Batu”. Jl. Jenderal Sudirman 507 Batu.

Wahyuningsih, Ernawati, 2016, “wawancara bantuan kemiskinan bidang kesejahteraan rakyat”. Jl. Jenderal Sudirman 507 Batu

Lampiran-Lampiran

1. Lampiran Dokumentasi Foto





2. Lampiran Surat

**PEMERINTAH KOTA BATU**
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Jenderal Sudirman 507 Block Office Gedung B Lantai 2

KOTA BATU

Batu, 11 April 2016

Kepada

Nomor : 07210669/1422.207/2016
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Yth. 1. kepala Bappeda Kota Batu
2. Kepala Dinsosnaker
3. Kepala Badan Pusat Statistik Kota batu
4. Sekretaris DPRD Kota Batu
5. kepala Bagian Umum setda Kota batu
di-

BATU

Menunjuk surat pengantar dari Dekan fakultas Ilmu budaya dan Politik Universitas Brawijaya Malang tanggal : 07 April 2016 nomor : 406/UN10.1.16/AK/2016 Perihal : Ijin Penelitian, bersama ini diberitahukan bahwa :

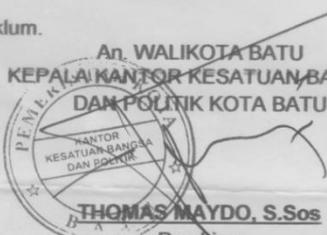
Nama : REZA PRATAMA
NIM : 105120501111010
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas/Universitas : FISIP Universitas Brawijaya Malang
Alamat : Jl. Veteran Malang

Bermaksud mengadakan Penelitian pada Instansi yang Saudara pimpin dengan ketentuan sebagai berikut :

Judul : Peran dan strategi pemerintah kota batu dalam mengentaskan kemiskinan
Data Yang Dicari : Tingkat kemiskinan di kota batu tahun 2010 s/d 2015 - Program unggulan pengentasan kemiskinan
Lokasi : - Bappeda - dinsosnaker - BPS - DPRD - Bagian Umum setda
Peserta : 5 (lima) orang
Waktu : 15 April s/d 31 Mei 2016

Selama melakukan kegiatan wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dan melaporkan secara tertulis hasil kegiatannya kepada instansi setempat.
Demikian untuk menjadikan maklum.

An. WALIKOTA BATU
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA BATU


THOMAS MAYDO, S.Sos
Pembina
NIP. 19731209 199303 1 003



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Veteran, Malang 65145, Indonesia

Telp. (0341) 575755; Fax (0341) 570038

Website : www.fisip.ub.ac.idEmail : fisip@ub.ac.id

Nomor : 2015 /UN.10.1.16/AK/2016
 Lampiran : -
 Permohonan : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada : Yth.Kepala
 Bappeda kota Batu
 Di Tempat

Dalam rangka menempuh penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan oleh setiap Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang, maka kami mohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu mengijinkan Mahasiswa kami :

Nama : Reza Pratama
 NIM : 105120501111010
 Jenis Kelamin : Laki - Laki
 Program Studi : Ilmu Politik
 Peminatan : Metode Ilmu Politik
 Telp/HP : 081335550327
 Judul Skripsi : Peran dan Strategi Pemerintah Kota Batu dalam Mengentaskan Kemiskinan
 Lokasi Penelitian : Bappeda kota Batu
 Lama Penelitian : Bulan Maret - April 2016

Untuk dapat diterima melakukan penelitian di tempat/daerah/instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat permohonan ijin ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik disampaikan terima kasih.

Malang, 24 MAR 2016



Maya Diah Nirwana, S.Sos., M.Si
 NIP. 19770611 200912 2 001

Tembusan : 1. Arsip